APARATUR SIPIL NEGARA

Pendukung Reformasi Birokrasi

Bambang Rudito • Achmad Ghazali • Hary Febriansyah
Adita Pritasari • Dematria Pringgabayu • Dany M. Athory Ramdlany

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

APARATUR SIPIL NEGARA
Pendukung Reformasi Birokrasi

Edisi Pertama

Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-127-0
13,5 x 20,5 cm
x, 152 hlm
Cetakan ke-1, Desember 2016

Kencana. 2016.0728

Penulis
Bambang Rudito, dkk.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Endang Wahyudin

Percetakan
PT Kharisma Putra Utama

Penerbit
K E N C A N A
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

KATA PENGANTAR

Multikultur suatu makna yang sarat dengan potensi dan tidak lagi sebagai kata yang bermakna kelemahan. Hal ini bisa diwujudkan ketika multikultur dimaknai sebagai keperbedaan yang saling mengisi dan berfungsi dengan proses bergerak bersama menuju satu tujuan sebagai ideologi dan nilai budaya yang dibentuk oleh sebuah masyarakat.

Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, multikultur, baik dari segi suku bangsa, agama, ras, dan juga pola kehidupan. Gambaran pola hidup dunia pada umumnya tergambar di Indonesia, dari berburu meramu hingga industri; masyarakat pantai hingga masyarakat pedalaman, masyarakat kota dan desa. Semua ini bermuara pada satu tujuan yaitu Indonesia yang mandiri dengan potensi yang multikultur tadi.

Keberagaman tersebut pada dasarnya disatukan oleh sebuah sistem pemerintahan dengan mengacu pada budaya yang satu sebagai pemersatu keanekaragaman yang ada. Perlunya budaya yang bersifat nasional menjadi hal yang penting dalam memapaki tujuan secara bersama.

Aparatur Sipil Negara adalah status yang mempunyai peran yang dapat dikategorisasikan sebagai peran kunci dalam menyosialisasikan tujuan negara dengan satu budaya nasional untuk menyinergikan budaya-budaya yang beraneka ini. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN bukanlah pegawai negeri sipil semata, tetapi aparat yang bekerja dengan nilai bu-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

daya Indonesia yang terbuka, inovatif, pelayan masyarakat, tidak membedakan anggota lainnya baik dari segi agama, ras, golongan, suku bangsa. ASN menjadi sebuah profesi bagi PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan tujuan agar pelayanan publik yang dilaksanakan lebih berkualitas bagi masyarakat

Tiga poin Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk pembangunan bangsa ini. Poin yang pertama, untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini dikarenakan keberadaan dari pegawai ASN memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kode etik, yang secara umum menjunjung prinsip integritas, nasionalisme, etika, komitmen antikorupsi serta semangat melayani masyarakat. Poin kedua, untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pegawai ASN diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas yang terkait dengan pembangunan. Poin ketiga, perwujudan dari tugas-tugas tersebut perlu di eksplisitkan dengan lebih mendalam.

Pegawai ASN bertugas sebagai pelayanan publik. Hal ini beriringan dengan amanat reformasi birokrasi, di mana kondisi yang sebelum terbitnya kebijakan reformasi birokrasi sangat rentan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, pegawai ASN yang profesional dan berintegritas diperlukan untuk mengatasi KKN yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. Dan didukung dengan sistem yang transparan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan juga meningkatkan kesejahteraan untuk segenap bangsa Indonesia.

Terkait dengan tugas pemerintahan, hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggarann fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Kondisi sebelumnya, kelembagaan pemerintahan tidak dapat berfungsi dengan baik, sudah menjadi santapan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk dicerca dan dijadikan

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

kambing hitam segala permasalahan berkaitan dengan birokrasi. Ditambah lagi dengan kondisi para pegawai pemerintahan yang kebanyakan kurang menghargai kedisiplinan, seperti keluyuran pada jam kantor, tidak pernah datang tepat waktu, dan birokrasi yang panjang, membuat sulit bagi masyarakat untuk tergantung terhadap lembaga pemerintahan serta pegawai di dalam lembaga tersebut pada saat mereka membutuhkannya. Sehingga keberadaan dari UU ASN ini menjadi momen perbaikan dari lembaga pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.

Perwujudan dari tugas yang terkait dengan pembangunan dilakukan melalui pembangunan bangsa yang berbasiskan pembangunan budaya dan politik, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Di mana tujuan pembangunan tersebut tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan, di mana segenap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan juga kesehatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi mereka tanpa perlu dibebani dengan biaya yang mahal. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian, seperti pengadaan tempat tinggal yang layak, sarana transportasi baik dari segi angkutan dan juga jalannya di tambah agar konektivitas antardaerah semakin tinggi, dalam kaitannya dengan energi penambahan kapasitas energi juga dilakukan untuk memastikan kegiatan dari masyarakat seperti kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal tersebut menjadi konsen dan tanggung jawab bagi para pegawai ASN, sehingga dapat dipastikan tujuan nasional dapat tercapai (baca arah dalam pemerintahan).

Buku ini merupakan hasil dari suatu penelitian tentang sumber daya manusia bagaimana sebuah lembaga negara dapat melakukan pembaruan dan sekaligus sebagai mata rantai visi dan misi negara sebagai pembaru dalam budaya nasional. Di buku

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

ini dimasukkan juga kasus-kasus birokrasi daerah seperti, profil Bupati Bojonegoro, Bupati Bantaeng, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Bupati Batang.

Penulis

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

DAFTAR ISI

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Bagian 1

Masa Depan Bangsaku

Mari kita tengok bangsa Indonesia yang kita cintai ini sejenak, bagaimana bangsa ini bermukim dan hidup. Bangsa ini berada di daerah subur dengan daratan yang berupa pulau-pulau serta lautan menjadi antara daratan tersebut, sehingga disebut juga dengan nusa antara atau Nusantara, dengan lokasi yang berada di garis khatulistiwa, secara astronomis berada di tengah antara bumi bagian utara 6^{o} LU (Lintang Utara) dan selatan 11^{o} LS (Lintang Selatan), serta membujur dari 95^{o} BT (Bujur Timur) - 141^{o} BT (Bujur Timur). Sudah sejak dahulu menjadi jalur perdagangan internasional, membuat lokasi bangsa Indonesia ini sangat strategis baik dalam hal sosial, budaya, dan ekonomi. Garis khatulistiwa membentang dari barat sampai timur Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia garis ini melintasi beberapa daerah dan kota, sehingga pola angin akan berubah tepat pada garis khatulistiwa seperti angin muson dan pola alur gelombang laut. Tempat artistik ini menjadikan Indonesia sebagai surganya ikan-ikan laut bertelur dan berkembang biak.

Secara sosial, lokasi bangsa Indonesia membuat bangsa ini menjadi tempat berinteraksi bangsa-bangsa internasional, hal ini dapat dilihat dengan keluar masuknya pemikir-pemikir asing yang selanjutnya ide-ide dan pemikiran-pemikiran asing

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

tersebut dipahami dan menjadi bagian dari berbagai budaya di seantero bangsa ini. Orang-orang dari Cina yang terkenal dengan adanya I Tsing sejak zaman Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya di daerah Palembang telah masuk membawa ajaran Buddha, para pedagang Hindu dari India bahkan lebih tua lagi sejak abad ke-3 ketika Ratu Shima (Kerajaan Ratu Boko di Yogyakarta), Kerajaan Kutai ketika Raja Kudungga di Kalimantan Timur sampai kerajaan di Kutai tersebut menjadi Kerajaan Islam; kemudian ajaran Islam melalui Samudera Pasai Sumatra bagian utara di Aceh, Demak di Jawa Tengah melalui perdagangan, dan pengaruh agama Kristen melalui penjajahan Belanda, dan juga pengaruh agama-agama lainnya seperti agama Bahai dari Persia yang datang setelah Indonesia merdeka.

Bisa kita lihat bagaimana, masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Nasrani ke Indonesia, di mana masuknya agama-agama tersebut dapat dilihat dari sudut pandang kemudahan akses ke lokasi Indonesia itu sendiri. Datangnya agama-agama tersebut tentunya disertai budaya para pembawanya sehingga terjadi interaksi antara pendatang yang membawa budaya serta agama dengan budaya masyarakat setempat. Tak pelak lagi agama dan budaya pendatang juga dipahami dengan pengetahuan budaya serta kepercayaan yang sudah ada dan dimiliki oleh penduduk setempat sebagai kearifan lokal. Hal inilah selanjutnya ikut menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kondisi ini memunculkan banyak varian agama karena adanya percampuran budaya antara keyakinan dari pendatang dan keyakinan masyarakat lokal yang sudah melekat sejak dahulu.

Kemudahan akses secara alamiah ini jugalah yang membuat para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk menjual barang-barang dagangannya dan mencari hasil bumi bangsa Indonesia yang dapat diperjualbelikan di belahan bumi yang lainnya. Tentunya

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

secara tidak langsung kabar tentang Indonesia serta kehidupan sosial, ekonomi budaya masyarakat Indonesia telah tersebar ke seluruh dunia.

Dalam hal sumber daya alam, bangsa Indonesia terkenal sangat kaya dengan hasil bumi yang dihasilkan alamnya. Di tahun 2013, Indonesia adalah penghasil terbesar dari sayur-sayuran, kayu manis, cengkeh, kelapa, dan vanila. Selain dari pertanian dan perkebunan, kekayaan alam Indonesia juga mengandung bahan-bahan mineral dan gas alamnya, sebut saja batu bara, emas, tembaga, timah, minyak, dan gas bumi yang mengendap mulai dari Sabang di Provinsi Aceh Darussalam hingga Merauke di Provinsi Papua dari Pulau Miangas di utara di Provinsi Sulawesi Utara hingga Pulau Roti (Rote) di selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di tahun 2012, McKinsey Global Institute merilis laporan yang menunjukkan potensi dari bangsa Indonesia. Pada saat laporan itu dirilis, kondisi bangsa Indonesia adalah, negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, 45 juta anggota kelas konsumen, 53 persen penduduk tinggal di perkotaan dan menghasilkan 74 persen PDB, 55 juta tenaga kerja terampil dalam perekonomian Indonesia dan 0,5 triliun dollar AS peluang pasar dalam jasa konsumen, agrikultur dan perikanan, sumber daya energi dan pendidikan. Dengan kondisi tersebut, pada waktu itu diprediksi pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dengan 135 juta anggota kelas konsumen, 71 persen penduduk tinggal di perkotaan dan menghasilkan 86 persen PDB, 113 juta tenaga kerja terampil dibutuhkan, dan 1,8 triliun dollar AS peluang pasar dalam jasa konsumen, agrikultur dan perikanan, sumber daya energi dan pendidikan.[1]

[1] Laporan McKinsey Global Institut, September 2012, “Perekonomian nusantara: Menggali potensi terpendam Indonesia”

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana dengan diberlakukannya MEA pada tanggal 31 Desember 2015, semakin memperkuat posisi bangsa Indonesia sebagai negara yang besar. Kekuatan ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dimiliki oleh MEA, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi di tahun 2014, MEA memiliki PDB gabungan sebesar 2,6 triliun dollar AS, hal itu sama dengan ke-7 terbesar di dunia dan ke-3 terbesar di Asia. Dengan jumlah penduduk gabungan sebanyak 622 juta penduduk, menunjukkan kawasan MEA merupakan pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Di antara tahun 2007-2014 perdagangan di antara anggota MEA mencapai 1 triliun dollar AS. Hal ini juga didukung dengan investasi langsung dari asing yang mencapai 136 miliar dollar AS, dan hal ini merupakan 11 persen dari total global investasi asing. Sehingga dampaknya juga terasa dalam hal konektivitas di kawasan MEA, di mana di tahun 2014, sebanyak 105 juta turis yang datang di kawasan MEA dan hampir setengahnya berasal dari negara-negara yang tergabung dalam MEA. Hal lainnya yang menunjukkan konektivitas adalah jumlah penduduk yang telah terhubung internet meningkat secara signifikan, di tahun 2007 ada 11,8 dari 100 penduduk yang terhubung internet, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 28,6 penduduk di tahun 2014.[2]

Keberadaan MEA juga ikut menumbuhkembangkan aspek sosial-budaya-kemasyarakatan di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), di mana lebih dari 90 persen masyarakat di kawasan ASEAN yang telah melek baca tulis, hal ini menunjukkan tingkat peradaban yang sudah modern dari masyarakat di kawasan ini. Hal ini didukung dengan data, di mana 94 persen

[2] Fact Sheet-ASEAN Economic Community.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Kesenjangan Sosial

MEA merupakan suatu kesempatan melihat kawasan ASEAN menjadi suatu kesatuan yang dampaknya juga akan terasa kepada bangsa Indonesia. Banyak miskonsepsi terhadap MEA, di mana wacana yang diperlihatkan dengan keberadaan MEA adalah suatu persaingan di antara negara-negara ASEAN. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja misalnya, keberadaan MEA dijadikan alasan perlunya sertifikasi-sertifikasi dadakan yang dibuat untuk membendung membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Ironisnya selama dua puluh tahun terakhir bangsa kita sudah masuk ke dalam bursa tenaga kerja di berbagai negara, seperti Malaysia, Hong Kong, dan beberapa negara di Timur Tengah. Masyarakat harus melihat MEA sebagai suatu kesatuan, di mana dengan keberadaan MEA akan ikut serta membangun ketahanan di wilayah Asia Tenggara.

Sebagai ilustrasi adalah gap sosial ekonomi, bayangkan suatu kompleks perumahan mewah di kawasan Anda, di mana dalam satu rumah yang luasnya lebih dari 200 meter persegi tersebut terparkir lebih dari dua mobil, hal itu menunjukkan kemapanan dari orang-orang yang tinggal di kawasan mewah tersebut. Lalu coba Anda lihat ke perbatasan kawasan rumah mewah tersebut, di mana masih banyak penduduk yang hidupnya jauh sekali dari kesan mewah, mereka harus tinggal di rumah yang sangat sempit, berimpit, bahkan dalam satu rumah yang ukurannya sangat kecil tersebut harus tinggal lebih dari dua keluarga. Kondisi ini menjelaskan kepada kita bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi itu nyata, dan dampaknya adalah permasalahan-permasalahan yang sering kita kenal sebagai penyakit masyarakat. Sebut saja kasus-kasus penipuan, perampokan, jual beli narkoba, hingga perdagangan manusia marak kita dengar dalam berita setiap harinya. Lalu apa yang dipikirkan oleh para pemilik rumah di kawasan rumah mewah tersebut? Tentunya mereka akan meningkatkan keamanannya dengan menambah satpam, memasang pagar yang tinggi, dan melarang anak mereka main di jalan. Sayangnya, ketidakamanan yang dirasakan terbut membuat orang cenderung reaktif dibandingkan preventif. Sama halnya dengan MEA, wacana berlomba-lomba membuat sertifikasi dan standardisasi lebih menunjukkan suatu tindakan yang reaktif. MEA sendiri adalah tindakan yang preventif, dalam artian untuk menghindari kondisi ketidakamanan tadi, maka perlu dilakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. MEA memungkinkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di antara negara-negara di Asia Tenggara. Jalur investasi yang tidak hanya kepada negara-negara tertentu tetapi melihat bahwa MEA sebagai kesatuan sehingga membuat para investor memiliki lingkup investasi yang lebih luas. Sehingga pemerataan kesejahteraan di antara negara-negara MEA yang secara langsung dan tidak langsung memperkuat ketahanan dari kawasan ASEAN.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

anak-anak usia sekolah yang telah dan sedang mengenyam pendidikan. Dari segi kesehatan tingkat mortalitas turun dari 371 untuk 100.000 kelahiran di tahun 2007 menjadi 103 di tahun 2012, hal ini menunjukkan peningkatan kuantitas dan juga kualitas layanan kesehatan. Dalam hal kesetaraan gender juga semakin menunjukkan perubahan, di mana proporsi dari jumlah perempuan yang menduduki parlemen meningkat dari 12 persen di tahun 2000 menjadi 18,5 persen di tahun 2012.[3]

Dan dari kesemua itu yang paling penting adalah potensi dari bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati oleh bangsa Indonesia, sejak tahun 2010 hingga 2035, di mana apabila hal tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi berkah dan jangan sampai sebaliknya menjadi bencana. Bonus demografi ini harus diakui secara jujur merupakan hasil kerja dari pemerintah sebelumnya yang dapat mengontrol laju pertumbuhan dengan mengusung konsep keluarga berencana (KB). Di mana Program KB ini tidak hanya memperlambat laju penambahan jumlah penduduk yang di tahun 2010 diperkirakan angka perlambatannya mencapai 100 juta penduduk, tetapi juga membantu dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat secara umum, khususnya dalam hal penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Begitu juga usaha penjarangan kelahiran yang memang sudah ada dan menjadi adat istiadat bangsa ini seperti penjarangan kelahiran melalui jamu oleh sebagian besar masyarakat di Jawa, senggama terputus (*coiptus interuptus*) oleh masyarakat Sumatra, dan juga beberapa pantangan seperti upacara sebagai usaha menjarangkan jarak kelahiran. Untuk itu, penting kita melihat secara khusus arti dari bonus demografi yang ada tersebut dan kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia.

[3] Fact Sheet-ASEAN Socio-Cultural Community.
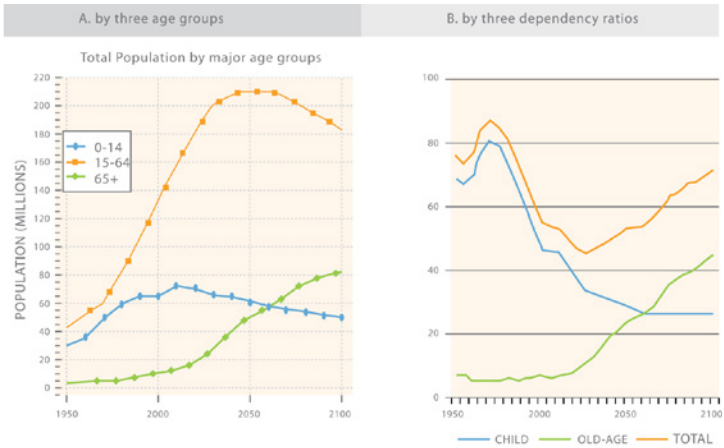
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Populasi di Indonesia Berdasarkan Umur dan Rasio Ketergantungan

BONUS DEMOGRAFI

Menurut laporan yang dirilis oleh United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia pada tahun 2015, bonus demografi adalah suatu keadaan demografi di mana kondisi tersebut secara ekonomi mendukung tingkat produksi dibandingkan tingkat produksi. Beberapa hal yang menandakan kondisi dari bonus demografi adalah rasio ketergantungan, rasio *economic support*, ketersediaan tenaga kerja, dan *human capital* (HC). Mengacu dari klasifikasi pembagian usia dalam demografi yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seperti yang terlihat di Gambar di atas, ada tiga kategori, yaitu anak-anak (0-14 tahun), produktif (15-64 tahun), dan lansia (di atas 65 tahun).

Dapat dilihat dari gambar di atas saat ini jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk yang dikategorikan dalam masa-masa produktif. Grafik kedua pada gambar yang sama, tingkat ketergantungan yang berada di bawah 60 persen di dalam rentang tahun 2000-2050. Hal ini menunjukkan ba-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

gaimana penduduk dengan usia produktif semakin sedikit menyokong penduduk yang dalam kategori harus disokong. Dari data yang ada di prediksi bahwa rasio ketergantungan tersebut akan mencapai titik terendahnya di tahun 2025 yaitu 45 orang yang disokong dari 100 orang penduduk. Lebih lanjut dalam laporan UNFPA Indonesia menyebutkan bahwa Profesor Adiutomo dengan menggunakan dari PBB memprediksi antara tahun 2020-2030 adalah *Windows of Opportunity*. Di mana hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit jumlah penduduk yang perlu disokong dan semakin banyak jumlah penduduk yang dapat menyokong. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu.

Lebih jauh lagi yang perlu diperhatikan dalam hal bonus demografi adalah Economic Support Ratios atau Rasio Sokongan Ekonomis. Rasio ini dimaksudkan untuk melihat berapa banyak konsumen efektif terhadap jumlah produsen efektif. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana dengan bonus demografi bangsa Indonesia dapat mendapatkan kondisi Rasio Sokongan Ekonomis yang dapat memenuhi tingkat konsumsi penduduk dengan pendapatan tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, bonus demografi juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja ini dihasilkan dengan bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dan secara proporsi jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia nonproduktif. Hal ini tentunya perlu diseimbangkan dengan penyediaan lapangan kerja bagi para penduduk usia produktif tersebut. Sehingga kebijakan dan juga sarana dan prasarana perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Sayangnya konsep ini tampaknya tidak memasukkan bentuk masyarakat yang subsisten, yang hidup dari kondisi alamnya dan tidak melakukan perdagangan kepada bentuk masyarakat

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

lainnya walaupun terjadi interaksi di dalamnya. Konsep yang dipaparkan ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi industri dan perdagangan pada masyarakat industri, dan bukan subsisten.

KONDISI BONUS DEMOGRAFI DI KOREA DAN JEPANG

Pada tahun 1970, Korea mendapatkan situasi di mana jumlah penduduk usia produktifnya bertambah, yang sangat jelas dilakukan oleh negara tersebut adalah dengan memastikan infrastruktur di negara tersebut siap, sehingga bonus demografi yang terjadi dapat didayagunakan secara optimal. Korea Selatan mulai membuat kebijakan terkait pengembangan industri di enam bidang, yaitu besi dan baja, perkapalan, elektronik dan perangkat elektronik, permesinan, logam lainnya, serta petrokimia. Pengembangan industri perlu diselaraskan dengan pengembangan dunia pendidikan, sehingga perbaikan sistem pendidikan juga dilakukan dari segala tingkat, baik dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pihak Industri juga mempersiapkan diri mereka dengan melakukan investasi terhadap inovasi teknologi, di mana investasi dengan modal yang cukup memadai membuat perkembangan industri di Korea Selatan cukup pesat, bisa kita lihat dari industri transportasi seperti pabrikasi mobil, elektronik, dan juga industri kreatif. Keberadaan dari industri-industri tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja tetapi juga sarat dengan sesuatu yang tidak berwujud, yaitu pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah yang terus memberikan nilai tambah kepada industri dan selanjutnya menjadi dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk Jepang sendiri, mendapatkan bonus demografi lebih awal dibandingkan Korea Selatan, di mana kondisinya saat ini Jepang memasuki masa berakhirnya bonus demografi yang ditandai dengan mulai lebih banyaknya jumlah penduduk usia nonproduktif dibandingkan jumlah penduduk dalam usia pro-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

duktif. Sehingga pada masa seperti sekarang ini, Jepang harus memastikan pembangunan tetap berjalan sambil menunggu stabilitas komposisi penduduk yang lebih proporsional.

Banyak negara yang tidak dapat memanfaatkan momen bonus demografi ini sehingga kondisi yang seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk kesejahteraan bangsanya menjadi hilang, bahkan menjadi bencana. Oleh sebab itu, dalam menghadapi bonus demografi ini perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik dengan melihat fase-fase yang menyertainya. Fase-fase tersebut diawali dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, lalu selanjutnya adalah kondisi di mana rasio ketergantungan yang semakin menurun dan fase akhirnya dari bonus demografi seperti yang dialami oleh Jepang, yaitu terjadi peningkatan jumlah penduduk usia nonproduktif (lansia).

Usia-usia produktif ini tidak hanya berdasarkan fisik saja tetapi juga usia produktif yang didasari atau disesuaikan dengan pola kehidupan yang ada. Jadi harus juga disesuaikan dengan modal sosialnya seperti kehidupan yang biasanya bertani, usia produktif dalam pertanian tentunya akan berbeda fungsinya dengan usia produktif dalam industri barang dan jasa atau nelayan, atau berladang atau kebun.

MODAL MANUSIA (HUMAN CAPITAL)

Faktor manusia sangatlah penting di dalam pembangunan suatu bangsa, jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi berkah ataupun bencana, tergantung bagaimana suatu negara mengembangkannya. Korea dan Jepang telah menunjukkan bagaimana pengembangan manusia disertai infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dari bangsanya. Bagaimana dengan Indonesia? Selayaknya negara Indonesia dapat menghasilkan manusia yang dapat menjadi modal dalam tumbuh kembangnya bangsa ini.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Kita menyadari betul bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memunculkan budaya yang berbeda-beda juga mengisi berbagai pola hidup dari yang subsisten hingga industri barang dan jasa. Kedua bentuk istilah ini yaitu ragam suku bangsa dan pola hidup akan membuat perbedaan yang sangat besar bagi tingkah laku budaya sebagai *human capital* bangsa Indonesia.

Pola hidup di daerah perdesaan dan bahkan di pedalaman sampai sekarang masih ada yang belum tersentuh oleh pola hidup lainnya, misalnya saja orang-orang yang hidup di daerah perkotaan Indonesia seperti di Bandung atau Jakarta, belum tentu pernah bertemu dan apalagi hidup di daerah kelompok masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah seperti orang-orang di pedalaman Sumatra, Kalimantan, dan bahkan Papua. Walaupun demikian, bukan berarti orang-orang yang hidup di pedalaman dan terpencil tersebut tidak mengalami perubahan. Dominasi bentuk masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat industri barang dan jasa sangat memengaruhi pola kehidupan keseluruhan masyarakat di Indonesia.

Kemajuan zaman yang terjadi saat ini menunjukkan suatu perubahan 180 derajat, di mana dua puluh tahun terakhir kita selalu melihat sesuatu yang berwujudlah yang dapat diandalkan. Tetapi hal tersebut sudahlah berubah, khususnya dengan munculnya era internet, di mana sesuatu yang tidak berwujud yang menjadi mesin penggerak perekonomian. Di tahun 70-an kita masih melihat komposisi 80:20 antara industri yang berwujud terhadap industri yang tidak berwujud dalam kaitannya menghasilkan Produk Domestik Bruto, tapi saat ini kondisinya adalah 20 persen PDB berasal dari industri yang berwujud dan 80 persen nya berasal dari industri yang tidak berwujud. Hal ini dibarengi dengan perbaikan dari sistem pendidikan dan juga kesehatan. Walaupun di lain pihak kondisi ini juga ikut berkon-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

tribusi terhadap kenaikan dalam standar kehidupan dan juga budaya, tetapi untuk saat ini mari kita fokus dalam kata kunci pengembangan manusia.

MANUSIA INDONESIA

Jika dahulu kita diajarkan di sekolah dasar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang berbudaya dengan penduduknya yang ramah. Dan bagi saya pribadi benar-benar merasakan hal tersebut di mana saya bisa bermain seharian tanpa perlu pengawasan dari orangtua. Lalu pada saat saya menginjak remaja saya mulai melihat perubahan dalam manusia Indonesia ini, beberapa ketidakteraturan yang mulai saya rasakan. Tidak adanya budaya mengantre, tidak mau mengalah, dan sampah ada di mana-mana menjadi pandangan yang saya lihat sehari-hari. Menginjak dewasa saya mendengar isu-isu seputar korupsi dan kejahatan-kejahatan yang menjadi bahan tontonan saya dan keluarga. Hal-hal tersebut membuat saya sering pesimis dengan masa depan bangsa ini. Bagaimana nasib penerus bangsa yang dahulu di sekolah dasar selalu diceritakan oleh para guru, bahwa generasi muda adalah generasi yang penting dikarenakan di tangan merekalah nasib bangsa ini ke depannya. Dengan perubahan zaman konsep pendidikan juga mulai berubah dari yang awalnya lebih ke arah pembangunan karakter berubah menjadi lebih kompetitif dengan menitikberatkan dalam hal yang full kognitif. Bayangkan untuk masuk SD mereka diharapkan sudah bisa baca tulis, bahkan ada beberapa taman kanak-kanak yang sudah mengajarkan matematika perkalian untuk anak-anak yang cenderung masih dikategorikan usia bayi tersebut.

Kalau kita melihat kondisi manusia Indonesia saat ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana nasib dari masa depan bangsa ini? Untuk itu diperlukan suatu perubahan dan juga strategi pengelolaan yang mendasar dalam hal pengelolaan manusia

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan munculnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

APARATUR SIPIL NEGARA

Jika kita melihat kondisi pegawai pemerintahan saat ini masih terlihat sangat bersifat *regulation based*. Hal ini dikarenakan selama 30 tahun pemerintahan sebelum reformasi tidak terlalu memperhatikan kinerja dari pegawai pemerintahan, yang pada masa itu disebut sebagai pegawai negeri sipil. Padahal, pada saat yang sama negara-negara tetangga kita sudah memiliki pegawai-pegawai pemerintahan yang kompeten dan juga profesional. Singapura dikenal sebagai negara dengan publik *servant* yang terbaik di dunia. Dan negara tetangga kita yang lainnya seperti Malaysia dan juga Thailand mengikuti jejak dari Singapura tersebut.

Saat ini kondisi perekonomian dunia sudah mulai bergeser, di mana pada tahun 1800-an pusat perekonomian di Benua Eropa, lalu di tahun 1900-an di Amerika, dan sekarang di tahun 2000-an di Asia. Di mana di Asia saat ini ada dua negara yang sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia, yaitu China dan India. Dan Indonesia merupakan yang paling potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-3 di Asia. Hal ini dikarenakan 30 tahun ke depan Indonesia akan memiliki 165 juta penduduk yang produktif, seperti yang dijelaskan sebelumnya (baca: bonus demografi). Singapura tidak akan bisa menjadi kekuatan ekonomi yang ke-3 dikarenakan skala konsumsi dan produksinya yang sangat terbatas. Sehingga untuk mengantisipasi bonus demografi tersebut, diperlukan reformasi birokrasi, sebagai proses percepatan perbaikan dalam pemerintahan, dan waktu untuk perbaikan itu hanya dalam waktu kurang dari 15 tahun.

Diceritakan oleh Prof. Sofian Effendi, sebagai langkah awal dalam reformasi birokrasi adalah lahirnya Undang-Undang

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di tahun 2014. Setelah proses yang cukup berliku setelah inisiasi pembahasannya oleh beberapa tokoh seperti Prof. Sofian Effendi dan Priyono Tjiptoherijanto di tahun 2011, rancangan undang-undang ini diterima oleh DPR. Beberapa tokoh di Komisi II DPR seperti Basuki Tjahaja Purnama, Ganjar Pranowo, dan Agun Gunandjar ikut meloloskan rancangan UU ASN ini. Di tahun 2013 diloloskan oleh DPR yang selanjutnya diteruskan kepada pihak pemerintah.

Lebih lanjut, Prof. Sofian Effendi mengatakan ada enam poin penting yang diharapkan dengan keberadaan UU ASN ini. *Pertama,* ASN adalah suatu profesi di pemerintahan, sehingga diperlukan persyaratan, kompetensi, dan tanggung jawab untuk ASN. *Kedua,* fokus dari manajemen ASN adalah jabatan-jabatan, di mana jabatan untuk pimpinan tinggi suatu pemerintahan harus melalui proses seleksi yang berasaskan rekam jejak yang bersangkutan, seperti dalam hal integritas, kepemimpinan, dan kepeloporan yang berdasarkan kode etik. *Ketiga,* percepatan reformasi, di mana yang sebelumnya PNS lebih ke arah *regulation based,* maka saat ini ASN diharapkan dapat menciptakan *High Performance Working System,* sehingga target untuk 15 tahun melakukan perubahan terhadap birokrasi dapat tercapai. *Keempat,* perubahan sistem kepegawaian baru, hal ini ditandai dengan dimungkinkan keberadaan kontrak kerja (P3K), yang pada awalnya dikhususkan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, yang selanjutnya di implementasikan juga dalam pemerintahan. *Kelima,* mendirikan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengawasi kode etik di lembaga negara, sebagai contoh dalam hal pengawasan penempatan suatu posisi dalam lembaga pemerintah. Dan terakhir yang *keenam,* perubahan dalam sistem penggajian dan pensiun.

Untuk poin terakhir ini yang bisa dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam lima tahun ke depan apabila

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

CIVIL SERVICE LEGISLATION: Waiting for Godot–By: Sofian Effendi Publish In Jakarta Post, On June 13 2013

If you like the theater, you may have seen Samuel Beckett' s Waiting for Godot, a famous play that deals with attitudes toward man' experience on earth and the pathos, cruelty, comradeship, hope, corruption, filthiness and wonder of the human experience.

Beckett' play tells a story of the hopeless destiny of the human race, as depicted by four raffish characters, an innocent boy who twice arrives with a message from Godot, a naked tree and one or two mounds of earth.

Two of the characters, Estragon and Vladimir, are waiting for Godot, who never arrives. The other two are a flamboyant lord of the earth named Frodo, and his broken slave, Lucky, who whimpers and staggers with a rope around his neck.

Beckett uses his drama to portray the story of mankind' faith in salvation. Even at the end, Godot never comes, and the bewildered protagonists go on with their lives without knowing why they are still hoping to meet Godot.

The play provides a useful parallel to the controversy surrounding the new Indonesian civil service legislation over the last few weeks.

I recently received a text message from a friend, a former senior executive at the State Secretariat, which relayed a very discouraging message: 'The inner circle in President' executive office will plunge RUU ASN [the civil service bill] into the sea.'

Holding up this bill is a real threat to a country aspiring to be the seventh largest economy in the world by the middle of this century. Indonesia needs to work very hard in a very short time to develop a highly professional and dynamic national public service to lead the country.

This is in order to realize two digit economic growth, build national capacity to deliver quality public services for its close to 300 million population, and turn its 220 million-strong productive population into a demographic dividend before the country celebrates its centennial year.

Around mid-July 2011, the House of Representatives approved an initiative to propose new legislation on the Indonesian civil service to replace Law No. 43/1999 on state employees.

The new legislation would define the Indonesian civil service as profession with basic norms, codes of conduct, specific competencies and requirements. The new legislation would also provide two employment statuses, civil servants and contractual government employees.

It would set up career leader services for senior executives in national and subnational agencies and establish an independent committee to formulate

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com